



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Nomor : 000.7.5/BP3R-TU/II/2026/37

Tanggal : 26 Februari 2026



BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

Jalan Otto Iskandardinata 107
Jakarta Timur 13330
www.badanpenghubung.riau.go.id



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung Badan Penghubung Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

PII INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai upaya untuk menyajikan hasil akhir dari rangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja. Disini akan dijelaskan capaian kinerja instansi yang didasari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penyerapan anggaran instansi dalam setahun anggaran.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja Badan Penghubung Provinsi Riau di masa yang akan datang, agar dapat mewujudkan salah satu prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimasa mendatang.

Jakarta, 26 Februari 2026



RIAU ADRIANSYAH, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830914 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Struktur Organisasi	1
I.3. Tugas dan Fungsi	6
I.3.1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau.....	6
I.3.2. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha	6
I.3.3. Tugas Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga.....	7
I.3.4. Tugas Kepala Subbidang Humas dan Protokol	8
I.3.5. Tugas Kepala Subbidang Pengelola Anjungan Riau	8
I.4. Aspek Strategis Organisasi.....	9
I.5. Permasalahan Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
II.1. Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Riau.....	10
Tujuan dan Sasaran Strategis	11
II.2. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
III.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
A. SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder.....	15
B. SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	35

III.2. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP.....	38
IV.1. Kesimpulan.....	38
IV.2. Langkah Strategis.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Badan Penghubung TA 2025	3
Tabel 2. Golongan Ruang PNS Badan Penghubung TA 2025	4
Tabel 3. Pendidikan Formal PNS Badan Penghubung TA 2025	5
Tabel 4. Diklat Perjenjangan PNS Badan Penghubung TA 2025.....	5
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	12
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung TA 2025	13
Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	14
Tabel 8. Interpretasi Nilai IKM	16
Tabel 9. Nilai IKM Badan Penghubung per triwulan TA 2025	17
Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Penghubung TA 2025.....	17
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi TA 2024 dan 2025	18
Tabel 12. Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	18
Tabel 13. Perbandingan Target Akhir Renstra 2030 dengan Realisasi TA 2025.....	19
Tabel 14. Pemetaan Capaian Kinerja dan Anggaran TA 2025.....	21
Tabel 15. Daftar Event Subbid Pengelola Anjungan yang ditargetkan pada APBD TA 2025	22
Tabel 16. Penyesuaian Anggaran Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	22
Tabel 17. Jumlah pengunjung Anjungan Riau TMII tahun 2025.....	25
Tabel 18. Capaian Kegiatan Pelayanan Protokoler Tahun 2025.....	27
Tabel 19. Capaian Kegiatan Pelayanan Kehumasan Tahun 2025.....	28
Tabel 20. Penyesuaian Anggaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat.....	28
Tabel 21. Capaian Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Tahun 2025.....	31
Tabel 22. Penyesuaian Anggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.....	31

Tabel 23. Capaian Fasilitasi Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	32
Tabel 24. Penyesuaian Anggaran Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.....	32
Tabel 25. Target Nilai SAKIP tahun 2025	35
Tabel 26. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP tahun 2023 dan 2024.....	36
Tabel 27 Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan 2024 dengan Target Akhir Renstra	36
Tabel 28. Realisasi Fisik dan Anggaran TA 2025	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Badan Penghubung.....	2
Gambar 2. SDM Badan Penghubung	4
Gambar 3. Golongan Ruang PNS Badan Penghubung	4
Gambar 4. Tingkat Pendidikan PNS Badan Penghubung.....	5
Gambar 5. Jenjang Diklat PNS Badan Penghubung.....	6
Gambar 6. Grafik Capaian Kinerja Tahun 2021-2025.....	19
Gambar 7. Acara Silaturahmi Gubernur & Wakil Gubernur dengan Masyarakat Riau di Jakarta	23
Gambar 8. Pelantikan Pengurus PMRJ di Jakarta	23
Gambar 9. Acara Melayu Berdendang di Anjungan Riau.....	24
Gambar 10. Senam Bersama di Anjungan Riau	24
Gambar 11. Grafik Pengunjung Lokal Anjungan Riau TMII.....	26
Gambar 12. Grafik Pengunjung Mancanegara Anjungan Riau TMII	27
Gambar 13. Fasilitasi Keprotokolan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.....	29
Gambar 14. Fasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Peluncuran Desk Koordinasi Penanganan Karhutla.....	29
Gambar 15. Fasilitasi Audiensi Gubernur Riau bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Riau dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri PPN/Bappenas RI dan Menteri Pendidikan Dasar & Menengah RI.....	30
Gambar 16. Mendampingi dan melayani kegiatan Bapak Gubernur Riau pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan	30
Gambar 17. Kegiatan "Balek Besamo" Mahasiswa Riau Yogyakarta	33
Gambar 18. Kegiatan "Balek Besamo" Mahasiswa Riau Jakarta.....	34
Gambar 19. Acara Silaturahmi Gubernur Riau dengan Tokoh Masyarakat Riau di Jakarta	35

BAB I

PENDAHULUAN

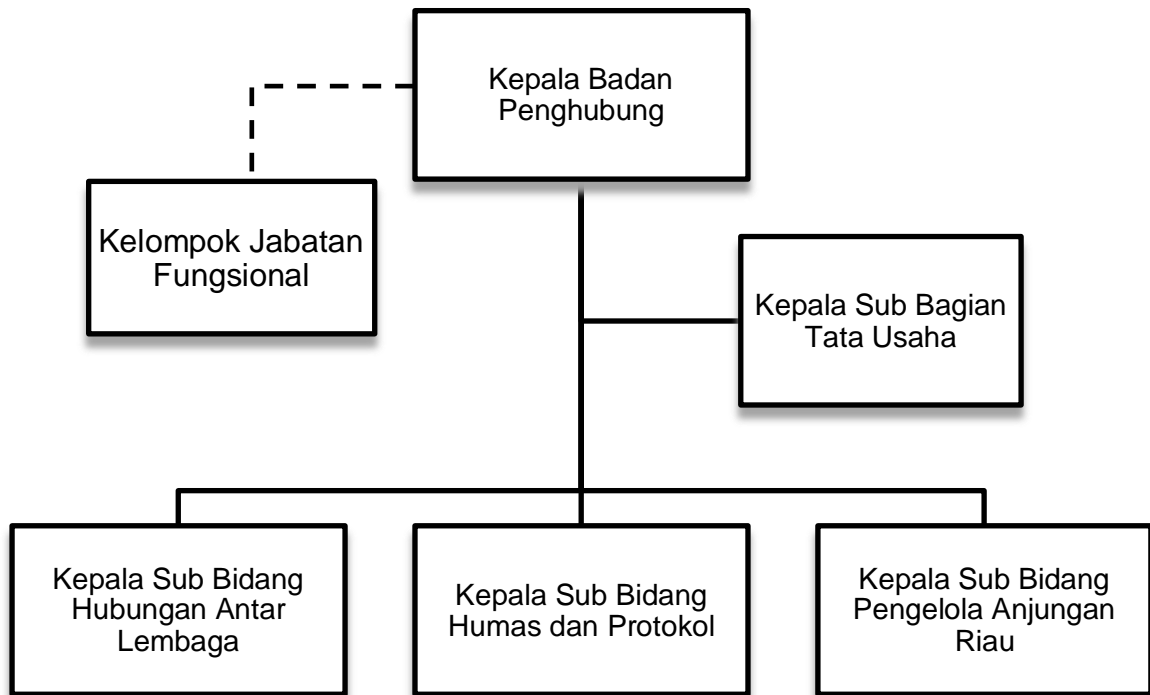
I.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan beberapa aturan berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Dokumen Rencana Strategis Badan Penghubung 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

I.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau, berikut adalah struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi Riau.



Gambar 1. Struktur Badan Penghubung

Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis pada sub bagian Tata Usaha, sub bidang Hubungan Antar Lembaga, sub bidang Humas dan Protokol serta sub bidang Pengelola Anjungan Riau.
- Pelaksanaan tugas teknis pada sub bagian Tata Usaha, sub bidang Hubungan Antar Lembaga, sub bidang Humas dan Protokol serta sub bidang Pengelola Anjungan Riau.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada sub bagian Tata Usaha, sub bidang Hubungan Antar Lembaga, sub bidang Humas dan Protokol serta sub bidang Pengelola Anjungan Riau.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada sub bagian Tata Usaha, sub bidang Hubungan Antar Lembaga, sub bidang Humas dan Protokol serta sub bidang Pengelola Anjungan Riau.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Penghubung merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) yang membawahi 4 (empat) Pejabat Pengawas (eselon IV.a). Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Riau sebagai berikut :

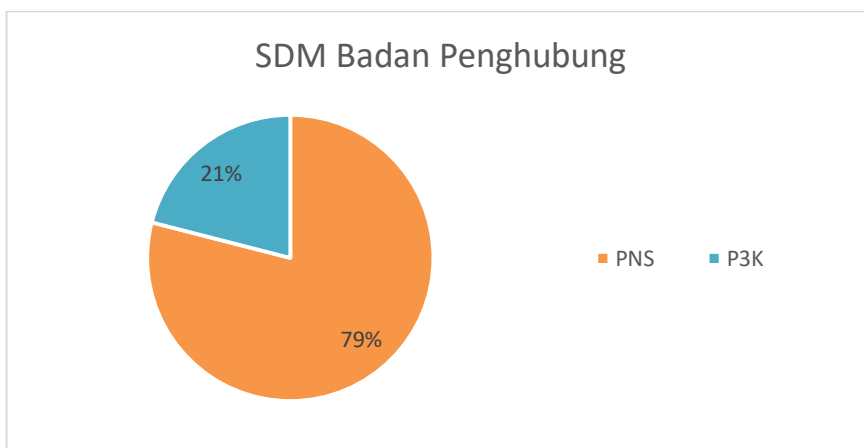
1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Humas dan Protokol
5. Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Penghubung Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir Desember 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 55 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dengan rincian sebagai berikut :

No	Pegawai	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	22	33	55	79%
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	8	7	15	21%
	Jumlah	30	40	70	100%

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Badan Penghubung TA 2025

Sumber: Laporan Rekapitulasi Pegawai Tahun 2025



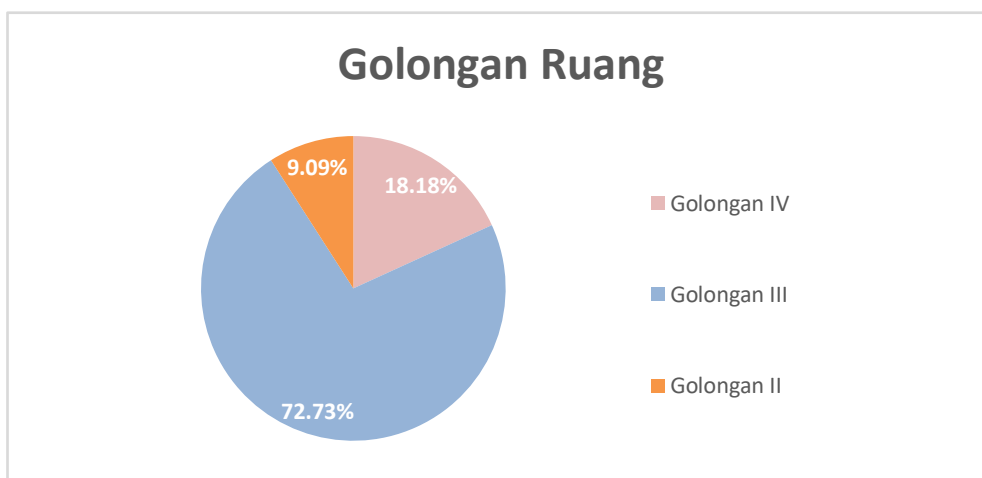
Gambar 2. SDM Badan Penghubung

Berikut adalah keadaan PNS Badan Penghubung Provinsi Riau berdasarkan golongan ruang gaji. PNS Badan Penghubung didominasi oleh golongan III sebanyak 72,73%, yang diikuti oleh Golongan IV sebanyak 18,18% kemudian Golongan II sebanyak 9,09%.

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Golongan IV	3	7	10	18,18%
2	Golongan III	16	24	40	72,73%
3	Golongan II	3	2	5	9,09%
	Jumlah	22	33	55	100,00%

Tabel 2. Golongan Ruang PNS Badan Penghubung TA 2025

Sumber: Laporan Rekap Pegawai 2025



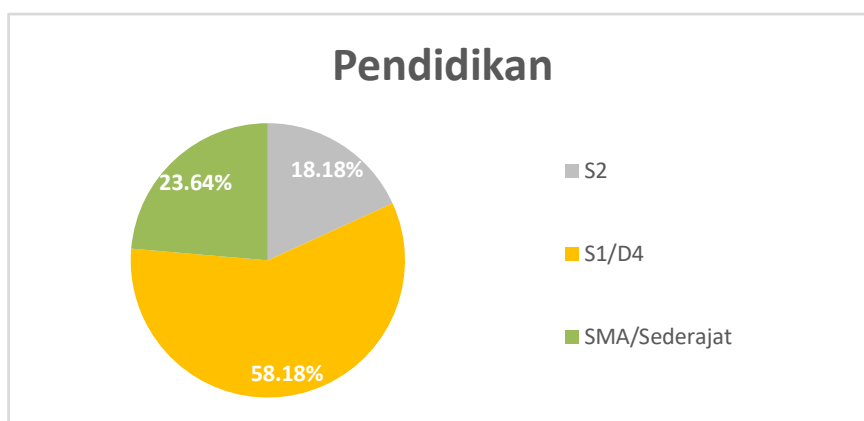
Gambar 3. Golongan Ruang PNS Badan Penghubung

Jika dilihat dari tingkat pendidikan formal, PNS Badan Penghubung sudah cukup baik. PNS Badan Penghubung didominasi lulusan S1/D4 sebanyak 50,88%, lulusan S2 sebanyak 24,56%, lulusan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 22,81% dan lulusan D3 berjumlah 1,75%. Berikut adalah keadaan PNS Badan Penghubung Provinsi Riau berdasarkan pendidikan formal :

No	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	S2	2	8	10	18,18%
2	S1/DIV	14	18	32	58,18%
3	SMA/Sederajat	6	7	13	23,64%
	Jumlah	22	33	55	100%

Tabel 3. Pendidikan Formal PNS Badan Penghubung TA 2025

Sumber: Laporan Rekap Pegawai 2025



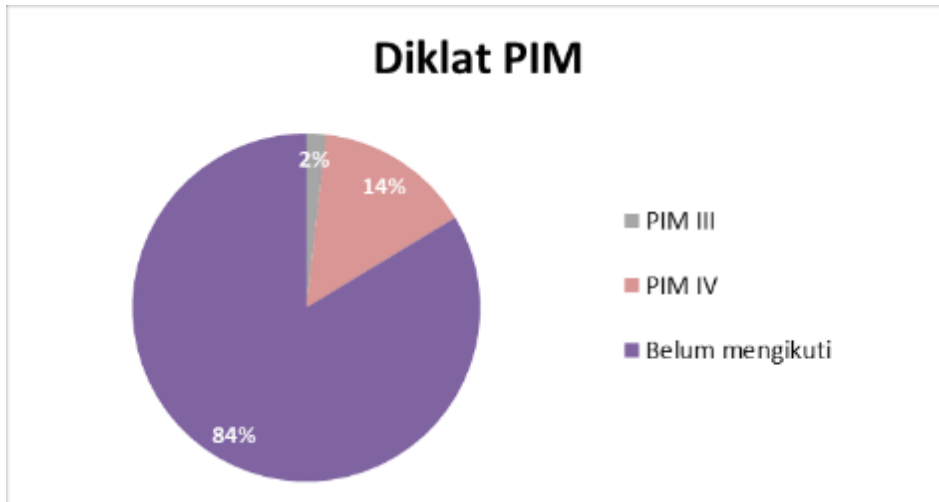
Gambar 4. Tingkat Pendidikan PNS Badan Penghubung

PNS Badan Penghubung yang telah mengikuti diklat perjenjangan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Jenjang	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Diklat PIM III	1	0	1	1,82%
2	Diklat PIM IV	2	6	8	14,54%
3	Belum mengikuti	19	27	46	83,64%
	Jumlah	22	33	55	100,00%

Tabel 4. Diklat Perjenjangan PNS Badan Penghubung TA 2025

Sumber: Laporan Rekap Pegawai 2025



Gambar 5. Jenjang Diklat PNS Badan Penghubung

I.3. Tugas dan Fungsi

I.3.1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau

Kepala Badan Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya.

Kepala Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, umum, keuangan dan barang milik daerah.
- b. Penyelenggaraan perencanaan program dan pelaporan.
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan penataan kelembagaan
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Penghubung.
- e. Pengelolaan Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah.
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.3.2. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi transportasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung.
- d. Melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan kantor.
- e. Melaksanakan administrasi persuratan dan kearsipan.
- f. Mengelola administrasi kepegawaian.
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Peta Jabatan, Proyeksi Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan.
- h. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.
- i. Melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen dan laporan perencanaan.
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program.
- k. Melaksanakan administrasi dan pelaporan keuangan serta aset daerah.
- l. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- m. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor.
- n. Mengelola sarana dan prasarana kantor.
- o. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keamanan dan ketertiban.
- p. Mengelola Mess Pemerintah Daerah sesuai fungsi Badan Penghubung
- q. Mengelola Asrama Mahasiswa Riau di Pulau Jawa sesuai fungsi Badan Penghubung.
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

I.3.3. Tugas Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga

Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Hubungan Antar Lembaga.

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan memtugas bawahan di lingkungan Subbidang Hubungan Antar Lembaga
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta antar Lembaga Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah
- d. Memfasilitasi urusan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Mahasiswa Riau.
- e. Menghimpun dan mengolah data kemasyarakatan dan kemahasiswaan.
- f. Memfasilitasi bantuan layanan kesehatan dan sosial bagi Masyarakat Riau.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Hubungan Antar Lembaga.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

I.3.4. Tugas Kepala Subbidang Humas dan Protokol

Kepala Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Humas dan Protokol.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pelayanan.
- c. Melaksanakan pelayanan akomodasi dan keprotokolan pejabat eksekutif dan legislatif serta tokoh Masyarakat Riau yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta dan sekitarnya.
- d. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi melalui media cetak dan elektronik.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Humas dan Protokol.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

I.3.5. Tugas Kepala Subbidang Pengelola Anjungan Riau

Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengelola Anjungan Riau.

- c. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan/pagelaran seni budaya dari Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- d. Melaksanakan festival, parade, karnaval dan lomba seni budaya di Taman Mini Indonesia Indah dan tempat lainnya.
- e. Melaksanakan pengembangan dan pengembangan seni budaya Riau.
- f. Melaksanakan atau memfasilitasi pameran dan workshop seni budaya, pariwisata dan produk unggulan.
- g. Melaksanakan pelayanan informasi seni, budaya, pariwisata dan produk unggulan.
- h. Melaksanakan pengolahan data seni, budaya dan pariwisata Riau.
- i. Melaksanakan pengolahan data pengunjung Anjungan Riau.
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengelola Anjungan Riau.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

I.4. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau, Badan Penghubung merupakan urusan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Penghubung dipimpin oleh Pejabat Administrator (eselon III.a) dan berada di Ibukota Negara. Kondisi yang demikian menyebabkan Badan Penghubung memiliki aspek strategis dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintahan Pusat dan Stakeholder lainnya.

I.5. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Provinsi Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan kebijakan anggaran yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan.
2. Belum optimalnya pengelolaan kegiatan yang bersifat kolaboratif antara perangkat daerah dengan organisasi non pemerintah.
3. Belum optimalnya pengelolaan administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Riau

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan yang ada di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA). RPJMD selanjutnya akan dirujuk dan dipedomani oleh Badan Penghubung dalam dokumen Rencana Strategis sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau di Jakarta. Renstra SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Riau menyajikan tugas dan fungsi Badan Penghubung untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala yang belum sepenuhnya ditangani pada periode 2019-2024 yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun ke depan sebagai akibat dari terjadinya perubahan lingkungan internal dan eksternal yang strategis, dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus mengontrol fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode dimaksud dan Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dan standar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja.

Rencana Strategis (RENSTRA) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan Strategis

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Riau, perlu ditetapkan langkah yang terarah dan bentuk tujuan strategis yang operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran dari pernyataan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang agar dapat diketahui dan harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sejalan dengan misi Gubernur Riau yang terkait secara langsung dengan Badan Penghubung, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik, sebagai penjabaran dari pernyataan tujuan dan misi dimaksud, Badan Penghubung menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2029 yaitu : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung.**

Tujuan rencana strategis perlu dipertajam dalam bentuk sasaran strategis dari rencana strategis Badan Penghubung Provinsi Riau.

2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis Badan Penghubung Provinsi Riau dari tujuan di atas yaitu : 1) **Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder** dan 2) **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.**

Rumusan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau

No	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

II.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kepala Badan Penghubung selaku pimpinan tertinggi dan sebagai pihak pertama melakukan perjanjian secara tertulis akan mewujudkan tercapainya target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 merupakan penjelasan lebih lanjut dari RKPD tahun 2025 dengan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahun 2025. Perjanjian kinerja tersebut menjelaskan target secara kuantitatif pada setiap indikator kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi Riau dalam tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Riau merupakan dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau dengan Gubernur Riau untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang disahkan pada 28 Oktober 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan perubahannya serta hasil reuiu. Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	85
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	67

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung TA 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan OPD. Akuntabilitas kinerja OPD diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengukuran Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \%$$

Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	≥ 91	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Untuk menganalisa capaian kinerja OPD, kita bisa lihat kaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Ada 2 sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

A. SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder

Sasaran strategis pertama Badan Penghubung Provinsi Riau adalah meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Stakeholder, dimana yang menjadi indikator kinerjanya adalah indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder. Target capaian kinerja untuk tahun 2025 adalah 85. Untuk perhitungan nilai kepuasan pelanggan (Indeks Kepuasan Masyarakat selanjutnya disingkat IKM) didapat dari rumus berikut :

$$\text{Nilai kepuasan masyarakat (IKM)} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Hasil penilaian persepsi layanan pada setiap unsur layanan yang dikumpulkan melalui survey kepuasan kepada pengguna layanan dikategorikan dalam skala likert 1 – 4. Total nilai persepsi pada unsur layanan dikonversikan menjadi nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM merupakan nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada pengguna layanan.

Hasil IKM yang diperoleh dari perhitungan menggunakan skala nilai tertentu kemudian **dikonversi ke dalam bentuk persen (skala 100)** untuk memudahkan interpretasi dan pelaporan. Metode survey, perhitungan penilaian persepsi, rekapitulasi dan interpretasi IKM mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Interpretasi Nilai IKM sebagai berikut :

Nilai Interval	Kategori	Interpretasi Umum
88,31 - 100	Sangat Baik	Pengguna sangat puas dengan pelayanan sangat baik, kebutuhan dan harapan pengguna layanan terpenuhi dengan sangat baik
76,61 – 88,30	Baik	Pengguna puas dengan pelayanan yang baik, kebutuhan dan harapan pengguna layanan terpenuhi dengan baik
65,0 – 76,60	Kurang Baik	Pengguna kurang puas, sebagian besar unsur layanan belum sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan
25 – 64,99	Tidak Baik	Pengguna tidak puas pelayanan dinilai buruk, perlu perbaikan unsur layanan secara menyeluruh

Tabel 8. Interpretasi Nilai IKM

Berdasarkan uraian tugas dan fungsinya, pelayanan yang dilakukan Badan Penghubung Provinsi Riau yang dihitung nilai IKM-nya mencakup urusan layanan sebagai berikut :

- Fasilitasi urusan masyarakat
- Fasilitasi urusan pemerintahan
- Fasilitasi informasi/kehumasan
- Fasilitasi pelayanan pejabat daerah
- Fasilitasi promosi seni budaya, pariwisata, produk unggulan dan potensi daerah

Nilai realisasi yang didapat setelah dilakukan penghitungan nilai IKM untuk layanan yang disebut diatas adalah sebagai berikut :

Triwulan	Jenis Layanan					Capaian Akhir
	Fasilitasi masyarakat	Fasilitasi urusan pemerintahan	Fasilitasi kehumasan	Fasilitasi pelayanan pejabat daerah	Fasilitasi promosi produng & senbud	
I	85,91	79,67	78,33	80	90,87	82,96
II	77,91	77,92	78,33	80	90,96	81,02

III	-	79,17	80	81,75	88,56	82,37
IV	-	82,54	80	81,75	85	82,32
Tahunan	81,91	79,83	79,17	80,88	88,85	82,17
Nilai IKM tahun 2025						82,17

Tabel 9. Nilai IKM Badan Penghubung per triwulan TA 2025

Nilai IKM Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025 adalah 82,17 sehingga untuk capaian kinerja dapat kita lihat di tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	85	82,17	96,67%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					96,67%

Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Penghubung TA 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai IKM Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025 adalah 82,17 atau capaiannya 96,67 %, dengan predikat “Sangat Tinggi”
- Capaian nilai IKM Badan Penghubung tahun 2025 secara umum kriteria “Baik” termasuk pada setiap unsur layanan
- Secara berurutan, kegiatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Seni Budaya menjadi pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu 88,85, diikuti kegiatan Fasilitasi Masyarakat, kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pejabat Daerah, kegiatan Fasilitasi Urusan Pemerintahan dan terakhir kegiatan Fasilitasi Kehumasan, dengan nilai terendah yaitu 79,17
- Periode dengan nilai IKM tertinggi yaitu pada TW I dengan nilai 82,96 dan terendah pada periode TW II dengan nilai 81,02

Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja dengan kategori ‘Sangat Tinggi’ :

1. Sumber daya manusia

- Secara umum, petugas yang melakukan pelayanan/fasilitasi di lapangan memberikan kesan ramah dan sopan sehingga membuat stakeholder merasa nyaman.
 - Sebagian besar personel mempunyai pengalaman yang cukup banyak, sehingga dapat melakukan pelayanan/fasilitasi dengan baik.
2. Anggaran
- Di beberapa pelayanan seperti humas dan protokol mempunyai anggaran yang cukup.
3. Hal teknis
- Adanya ketersediaan kuesioner secara manual dan online
 - Beberapa peralatan yang digunakan untuk melakukan pelayanan atau fasilitasi mempunyai kualitas yang cukup baik.

Berikut adalah perbandingan pencapaian tahun 2024 dan tahun 2025 :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	87	85,43	98,2%	85	82,17	96,67%
	CAPAIAN KINERJA				98,2%			96,67%

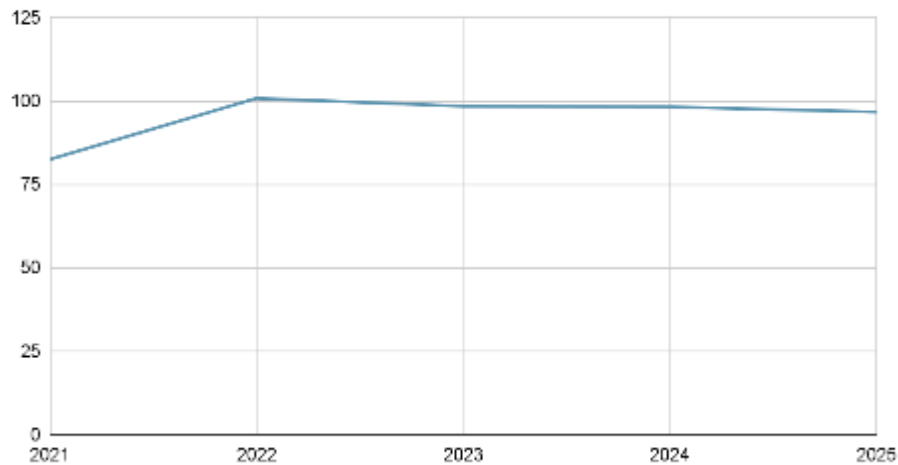
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi TA 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	82,45%	100,77%	98,4%

Tabel 12. Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kinerja Badan Penghubung mengalami penurunan sebesar 1,5% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Berikut adalah gambaran capaian kinerja Badan Penghubung dalam 5 tahun terakhir :

Kinerja Tahun 2021-2025



Gambar 6. Grafik Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target pada Renstra, maka didapatkan hasil seperti pada table berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Target 2030)	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	87,5	82,17	93,91%

Tabel 13. Perbandingan Target Akhir Renstra 2030 dengan Realisasi TA 2025

Jika dibandingkan realisasi tahun ini 82,17 dengan target akhir Renstra Badan Penghubung pada tahun 2030 di angka 87,5, maka capaian kinerja Badan Penghubung 93,91%.

Untuk perbandingan dengan Standard Nasional, dikarenakan Badan Penghubung tidak memiliki instansi vertikal sehingga tidak ada Standard Nasional yang menjadi acuan untuk perbandingan.

Berikut akan dijelaskan hambatan yang ditemui dan solusi yang telah dilakukan :

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Sumber daya manusia
 - a. Pemahaman pegawai terhadap tujuan organisasi, sasaran dan target kegiatan masih belum mumpuni, sehingga perencanaan kegiatandan anggaran tidak maksimal.
 - b. Jumlah personel khususnya di bagian pelayanan kehumasan dan anjungan masih kurang, sehingga tidak dapat melakukan pelayanan maksimal.
 - c. Kurangnya tenaga terampil dan ahli dalam pelayanan, sehingga meskipun pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik namun terasa monoton tanpa kreatifitas.
2. Anggaran

Adanya perubahan kebijakan anggaran menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga berdampak kepada hasil yang ingin dicapai tidak terealisasi dengan baik.
3. Hal teknis
 - a. Teknis pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum terdokumentasi secara digital sehingga jangkauan pengumpulan data survey belum komprehensif
 - b. Pengembangan layanan belum optimal karena keterbasan sumberdaya
 - c. Belum dimutakhirkannya SOP sesuai dengan kondisi saat ini dan belum adanya Standar Pelayanan yang mudah dipahami.

Solusi yang telah dilakukan dan direncanakan akan dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman pegawai tentang tujuan, sasaran dan target organisasi melalui diskusi berkala dan berkelanjutan sehingga pegawai mampu merencanakan kegiatan dan melakukan evaluasi internal dengan lebih baik.
2. Menyusun pembagian tugas yang jelas untuk menghindari terjadinya salah paham dalam komunikasi di lapangan.
3. Merancang metodologi survey IKM yang lebih valid, seperti metode sampling dan teknik analisis data yang lebih akurat.
4. Merancang instrumen survey ramah pengguna (*user friendly*) seperti penggunaan barcode dengan pertanyaan yang lebih mudah dipahami.

5. Melakukan pemutakhiran SOP dan mengesahkan Standard Pelayanan yang telah disusun agar kegiatan pelayanan yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
6. Melakukan penyusunan atau evaluasi anggaran agar lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih luas dan lebih maksimal.
7. Meningkatkan kemampuan SDM melalui bimtek, konsultasi atau sejenisnya terhadap kebutuhan pelayanan terutama pramuwisata di anjungan Riau.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian target organisasi, Badan Penghubung dibekali anggaran untuk masing-masing indikator dengan pemetaan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100\%$	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100\%$
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	87	82,17	96,67%	1.299.373.569	910.340.895	70.06%

Tabel 14. Pemetaan Capaian Kinerja dan Anggaran TA 2025

Penyerapan anggaran untuk tahun 2025 adalah sebesar 70,06%, sementara capaian kinerja 96,67%. Dengan melihat perbandingan dimana capaian kinerja lebih tinggi dibanding penyerapan anggaran, bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2025 penggunaan anggaran lebih efisien dan pelaksanaan kegiatan efektif.

Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya TA 2025

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau. Pada awal tahun anggaran, ada 6 even yang direncanakan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2025, namun karena adanya penyesuaian anggaran hanya 3 even yang terlaksana pada tahun 2025 seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut:

NO	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Acara Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Masyarakat Riau di Jakarta	Dihadiri kurang lebih 500 Orang	Terlaksana pada bulan Februari
2	Pekan Lebaran Anjungan Riau dan Hari Tari Sedunia	-	Direncanakan di bulan April, namun tidak terlaksana
3	Carnaval of Culture 2025 Memperingati HUT RI ke 80 dan HUT Provinsi Riau 68	-	Direncanakan di bulan Agustus, namun tidak terlaksana
4	Pelantikan Pengurus PMRJ di Jakarta	Dihadiri kurang lebih 500 Orang	Terlaksana pada bulan September
5	Melayu Berdendang dan Senam Bersama 33 Provinsi anjungan Daerah TMII di Anjungan Riau	Dihadiri kurang lebih 200 Orang	Terlaksana pada bulan Oktober
6	Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2025 Pentas Seni Budaya	-	Direncanakan di bulan November, namun tidak terlaksana

Tabel 15. Daftar Event Subbid Pengelola Anjungan yang ditargetkan pada APBD TA 2025

Penyesuaian anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.074.986.960,-	672.246.592,-

Tabel 16. Penyesuaian Anggaran Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Berikut adalah dokumentasi dari beberapa even yang telah dilaksanakan di Anjungan Riau TMII :

- Acara Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Masyarakat Riau di Jakarta



Gambar 7. Acara Silaturahmi Gubernur & Wakil Gubernur dengan Masyarakat Riau di Jakarta

- Pelantikan Pengurus PMRJ di Jakarta



Gambar 8. Pelantikan Pengurus PMRJ di Jakarta

- Acara Melayu Berdendang dan Senam Bersama di Anjungan Riau



Gambar 9. Acara Melayu Berdendang di Anjungan Riau



Gambar 10. Senam Bersama di Anjungan Riau

Jumlah pengunjung Anjungan Riau TMII tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Bulan	Pengunjung Lokal				Pengunjung Mancanegara			
		Dewasa	Anak	Pelajar / Mhs	Total	Dewasa	Anak	Pelajar / Mhs	Total
1	Januari	1.927	0	1.325	3.252	82	0	0	82
2	Februari	489	0	1.937	2.426	75	0	0	75
3	Maret	1.770	50	2.432	4.252	36	0	0	36
4	April	1.711	91	1.474	3.276	167	9	63	239
5	Mei	3.180	606	393	4.179	169	11	0	180
6	Juni	3.095	721	380	4.196	70	6	0	76
7	Juli	1.316	237	1.353	2.906	17	2	0	19
8	Agustus	971	108	2.231	3.310	31	2	0	33
9	September	1.252	538	1.612	3.402	41	0	0	41
10	Oktober	849	224	1.386	2.459	170	33	39	242
11	November	509	53	1.707	2.269	95	37	1	133
12	Desember	1.553	116	1.878	3.547	118	42	0	160
		Pengunjung Lokal			39.474	Pengunjung Mancanegara			1.316
	TOTAL	40.790							

Tabel 17. Jumlah pengunjung Anjungan Riau TMII tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui jumlah pengunjung Anjungan Riau TMII pada tahun 2025 sebanyak 40.790 orang dengan rata2 kunjungan 3.399 orang/bulan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu tahun 2024, dimana jumlah pengunjung berjumlah 42.623 dengan pelaksanaan 7 kegiatan apbd dan 2 kegiatan hasil kolaborasi/non-apbd, jumlah pengunjung tahun ini mengalami penurunan sebanyak 1.833 orang atau sebesar 4,3%. Tahun ini pelaksanaan kegiatan turun dari 7 kegiatan menjadi 3 kegiatan, dan sama sekali tidak ada kegiatan hasil kolaborasi/non-apbd. Namun jika dilihat lagi jumlah pengunjung tidak mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

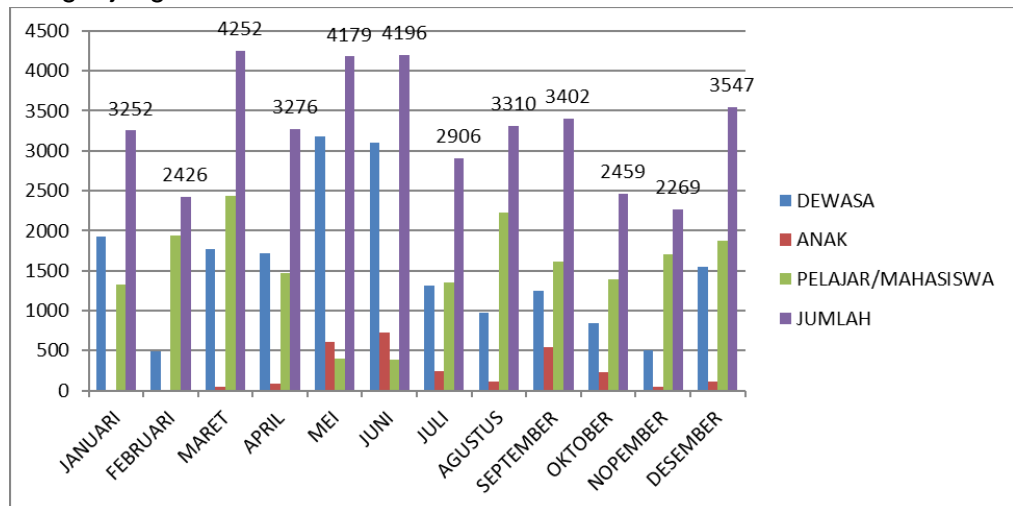
- Lokasi yang strategis karena berdekatan dengan gedung parkir.
Sejak TMII menerapkan kebijakan *go-green* yang melarang kendaraan pribadi (mobil/motor) berkeliling di dalam kawasan untuk mengurangi emisi karbon, pengunjung lalu menempatkan kendaraan pribadi mereka di gedung parkir yang lokasinya tidak jauh dari Anjungan Riau.
- Adanya promosi budaya yang dilakukan pihak TMII
Promosi budaya dari pihak TMII yang dilakukan pada tahun 2025 terasa lebih efektif menghadirkan banyak pengunjung seperti Workshop Kolaboratif Anjungan Daerah: Sebuah acara yang bertujuan meningkatkan

tata kelola dan promosi Anjungan Daerah TMII, yang menampilkan tarian daerah secara bergiliran setiap anjungan.

➤ Viralnya tradisi Pacu Jalur di media sosial

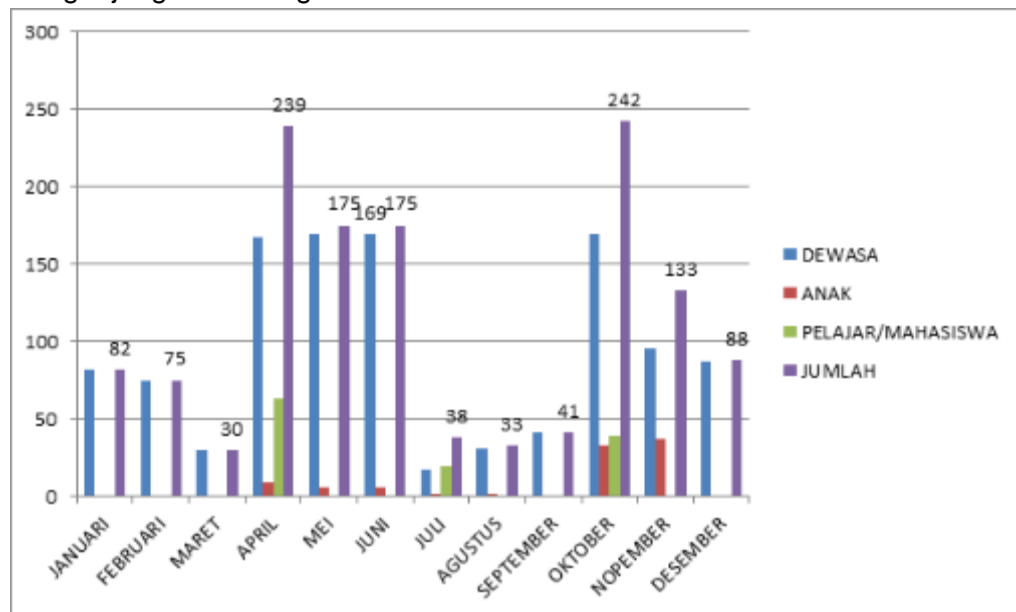
Adanya tren "Aura Farming" pada tradisi Pacu Jalur menarik perhatian global. Festival Pacu Jalur, yang merupakan warisan budaya tak benda, telah menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Ini menyebabkan lonjakan kunjungan ke Anjungan Riau yang membuat pengunjung ingin berfoto di pajangan 'Sampan Pacu Jalur' yang ada di Anjungan Riau.

Jika disimulasikan dalam bentuk grafik maka akan terlihat sebagai berikut :
Pengunjung lokal



Gambar 11. Grafik Pengunjung Lokal Anjungan Riau TMII

Pengunjung mancanegara



Gambar 12. Grafik Pengunjung Mancanegara Anjungan Riau TMII

2. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat TA 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Sub Bidang Humas dan Protokol melaksanakan 2 (dua) jenis fasilitasi/pelayanan dimana capaian dari masing-masing fasilitasi/pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Kegiatan Pelayanan Protokoler Tahun 2025

No	Bulan	Target	Realisasi	Selisih
1	Januari	5	3	-2
2	Februari	6	14	8
3	Maret	6	5	-1
4	April	4	4	0
5	Mei	8	17	9
6	Juni	7	6	-1
7	Juli	7	9	2
8	Agustus	6	10	4
9	September	6	11	5
10	Oktober	19	26	7
11	November	7	5	-2
12	Desember	6	8	2
JUMLAH		87	118	

Tabel 18. Capaian Kegiatan Pelayanan Protokoler Tahun 2025

Pelayanan protokol dilakukan untuk kegiatan kenegaraan yang dilaksanakan di Jakarta terkait dengan Pelayanan Pejabat yang mendapatkan fasilitas pelayanan pendampingan. Namun ada beberapa kendaraan yang tidak layak jalan akibat dari adanya pengurangan anggaran sehingga fasilitasi yang dilakukan tidak maksimal.

Capaian Kegiatan Pelayanan Kehumasan Tahun 2025

No	Bulan	Target	Frekuensi Capaian (kali)			Jumlah	Selisih
			Konvensional	Instagram	Facebook		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	2	-	1	1	2	0
2	Februari	4	-	3	3	6	2
3	Maret	4	-	3	3	6	2
4	Aprll	4	-	8	8	16	12
5	Mei	6	-	17	17	34	28
6	Juni	6	-	11	11	22	16
7	Juli	8	-	5	5	10	2
8	Agustus	8	-	5	5	10	2
9	September	4	-	8	8	16	12
10	Oktober	6	-	14	14	28	22
11	November	10	-	5	5	10	0
12	Desember	16	-	8	8	16	0
JUMLAH		82	-	88	88	176	94

Tabel 19. Capaian Kegiatan Pelayanan Kehumasan Tahun 2025

Pencapaian yang melebihi target disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Tokoh Masyarakat, Mahasiswa serta para Pejabat Pratama yang diliput, termasuk juga kegiatan Para Ketua Dekransa Provinsi, ketua TP PKK Provinsi dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi.

Penyesuaian anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	606.614.463,-	302.905.614,-

Tabel 20. Penyesuaian Anggaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Beberapa dokumentasi dari pelayanan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Keprotokolanan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tanggal 20 Februari 2025



Gambar 13. Fasilitasi Keprotokolanan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

- Memfasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Peluncuran Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13 Maret 2025



Gambar 14. Fasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Peluncuran Desk Koordinasi Penanganan Karhutla

- Memfasilitasi Audiensi Gubernur Riau bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Riau dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri PPN/Bappenas RI dan Menteri Pendidikan Dasar & Menengah RI pada tanggal 6 dan 7 Mei 2025



Gambar 15. Fasilitas Audiensi Gubernur Riau bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Riau dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri PPN/Bappenas RI dan Menteri Pendidikan Dasar & Menengah RI

- Mendampingi dan melayani kegiatan Bapak Gubernur Riau pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan pada tanggal 22 September 2025



Gambar 16. Mendampingi dan melayani kegiatan Bapak Gubernur Riau pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung TA 2025

Berikut adalah realisasi dari pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan pada tahun 2025

Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah pengambilan dokumen	Dok	27	27	27	27	27	18	22	21
	Jumlah fasilitasi urusan kelembagaan daerah dan pusat	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-

Tabel 21. Capaian Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Tahun 2025

Penyesuaian anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	720.144.147,-	266.929.893,-

Tabel 22. Penyesuaian Anggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

4. Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat TA 2025

Berikut adalah realisasi dari pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan pada tahun 2025

Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat	Jumlah fasilitasi lembaga masyarakat Riau di Jakarta	Kali	1	-	-	-	1	-	-	-
	Jumlah fasilitasi	Kali	2	3	2	2	3	1	-	-

	lembaga mahasiswa									
	Jumlah kontribusi assosiasi Forkappsi	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-
	Fasilitasi pemulangan dan pemulasaran jenazah	Kali	1	-	1	-	-	-	-	-

Tabel 23. Capaian Fasilitasi Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Penyesuaian anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	111.206.000,-	57.291.470,-

Tabel 24. Penyesuaian Anggaran Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Berikut adalah beberapa dokumentasi fasilitasi yang dilakukan pada tahun 2025 :

- Kegiatan "Balek Besamo" Mahasiswa Riau yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 24 Maret 2025. Keberangkatan dari Asrama Mahasiswa Yogyakarta sebanyak 90 orang pada tanggal 20 Maret 2025 dan dari Asrama Mahasiswa Lenteng Agung sebanyak 90 orang pada tanggal 24 Maret 2025.

Keberangkatan Yogya :



Gambar 17. Kegiatan "Balek Besamo" Mahasiswa Riau Yogyakarta

Keberangkatan Jakarta :



Gambar 18. Kegiatan "Balek Besamo" Mahasiswa Riau Jakarta

- Acara Silaturahmi Gubernur Riau dengan Tokoh Masyarakat Riau di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Hotel Ciputra Jakarta



Gambar 19. Acara Silaturahmi Gubernur Riau dengan Tokoh Masyarakat Riau di Jakarta

B. SASARAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis kedua Badan Penghubung Provinsi Riau adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dimana yang menjadi indikator kinerjanya adalah nilai SAKIP dan target capaian kinerja untuk penilaian tahun 2025 adalah 67. Capaian kinerja dari sasaran ini belum bisa dihitung karena evaluasi SAKIP tahun 2025 belum dilaksanakan.

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	67	-	-

Tabel 25. Target Nilai SAKIP tahun 2025

Nilai SAKIP menjadi indikator kinerja Kepala Badan Penghubung sejak tahun 2023, sehingga perbandingan nilai SAKIP yang diperoleh sejak tahun 2023 dan seterusnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	62	64,85	104,6%	64	67,1	104,84%

Tabel 26. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP tahun 2023 dan 2024

Pada Renstra 2025-2029 diketahui Nilai SAKIP menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Riau. Target akhir Nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2029 adalah 71. Untuk perbandingan capaian kinerja Nilai SAKIP tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2029 belum dapat dilakukan. Namun untuk capaian tahun-tahun sebelumnya perbandingannya dengan target akhir Renstra dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	71	64,85	91,34%	71	67,1	94,51%

Tabel 27 Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan 2024 dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan dengan Standard Nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat padanannya pada level nasional

Penyebab keberhasilan dan kegagalan belum dapat dilakukan untuk capaian kinerja tahun 2025 karena evaluasi SAKIP untuk tahun tersebut belum dilaksanakan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilakukan karena evaluasi tahun 2025 belum dilaksanakan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja belum dapat dilakukan karna evaluasi tahun 2025 belum dilaksanakan.

III.2. Realisasi Anggaran

Berikut adalah realisasi keuangan dari 4 sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Fisik			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100\%$	7	8	$9=8/7 \times 100\%$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	100	72,57	72,57%	1.299.373.569	910.340.895	70,06%

Tabel 28. Realisasi Fisik dan Anggaran TA 2025

Sub kegiatan yang diperhitungkan dalam realisasi fisik dan keuangan dalam tabel diatas adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
- Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
- Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Pada tahun 2025 capaian realisasi fisik 72,57% dan capaian realisasi keuangan 70,06%. Beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya ketidakpastian dalam penyelesaian pencairan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Riau disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

IV.1. Kesimpulan

Pada sasaran strategis pertama 'Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder' dan indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder' pada tahun 2025 dengan cara perhitungan nilai IKM secara manual, capaian kinerja Badan Penghubung adalah sebesar 96,67% dengan penyerapan anggaran sebesar 70,06%.

Pada sasaran strategis kedua "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator Nilai SAKIP, pencapaian Badan Penghubung adalah 67,1 naik 2,25 point dari tahun sebelumnya dengan predikat "B".

IV.2. Langkah Strategis

Dalam rangka peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, beberapa langkah strategis yang dapat dilaksanakan antara lain :

- Meningkatkan pemahaman pegawai tentang tujuan, sasaran dan target organisasi melalui diskusi berkala dan berkelanjutan sehingga pegawai mampu merencanakan kegiatan dan melakukan evaluasi internal dengan lebih baik.
- Merancang metodologi survey IKM yang lebih valid, seperti metode sampling dan teknik analisis data yang lebih akurat.
- Merancang instrumen survey ramah pengguna (*user friendly*) seperti penggunaan barcode dengan pertanyaan yang lebih mudah dipahami.

- Menyiapkan Standard Pelayanan, memutakhirkan SOP dan menyusun pembagian tugas yang jelas untuk menghindari terjadinya salah paham dalam komunikasi di lapangan
- Melakukan penyusunan atau evaluasi anggaran agar lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih luas dan lebih maksimal.
- Mengkoordinasikan upaya peningkatan kapasitas SDM dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan BPSDM Provinsi Riau.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini dibuat, semoga dapat menjadi manfaat dan memberikan kontribusi yang baik untuk Badan Penghubung Provinsi Riau dimasa mendatang.

Jakarta, 26 Februari 2026

**KETUA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU**



RIJHO ADRIANSYAH, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830914 200112 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDHO ADRIANSYAH, S.STP**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU**
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Dr. RAHMAN HADI, M.Si**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR RIAU**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR RIAU

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU**

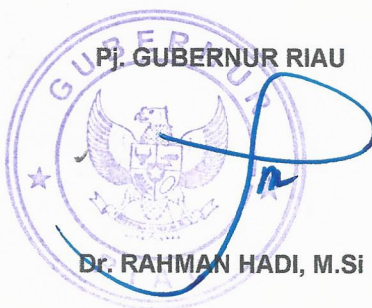
RIDHO ADRIANSYAH, S.STP
Pembina Tingkat I
RIA UNIP. 19830914 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	85
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	67

	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Rp 2.512.951.570
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 22.205.464.419

Pekanbaru, Januari 2025


Pj. GUBERNUR RIAU

Dr. RAHMAN HADI, M.Si


KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU

RIDHO ADRIANSYAH, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830914 200112 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDHO ADRIANSYAH, S.STP**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **S. F. HARIYANTO**
Jabatan : **Pt. GUBERNUR RIAU**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

Pihak Kedua,
Pt. GUBERNUR RIAU

S. F. HARIYANTO

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU**

RIDHO ADRIANSYAH, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830914 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	85
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	67

PROGRAM	ANGGARAN
1 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Rp 1.299.373.569
2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 21.640.772.099
TOTAL	Rp 22.940.145.668

Plt. GUBERNUR RIAU

S. F. HARIYANTO

Pekanbaru, November 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU

RIDHO ADRIANSYAH, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830914 200112 1 005